

**IMPLEMENTASI PASAL 25 PERATURAN DAERAH
PROVINSI LAMPUNG NOMOR 12 TAHUN 2014
TENTANG OPTIMALISASI PEMANFAATAN
SUMBER DAYA KELAUTAN
DAN PERIKANAN**
(Studi Di Dinas Kelautan Dan Perikanan
Provinsi Lampung

SKRIPSI

**Muhammad Gufron Juniansyah
NPM. 1921020633**

Program Studi :Hukum Tata Negara (*Siyasah Syar'iyah*)



**FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
1445 H/2024 M**

**IMPLEMENTASI PASAL 25 PERATURAN DAERAH
PROVINSI LAMPUNG NOMOR 12 TAHUN 2014
TENTANG OPTIMALISASI PEMANFAATAN
SUMBER DAYA KELAUTAN
DAN PERIKANAN**
(Studi Di Dinas Kelautan Dan Perikanan
Provinsi Lampung

SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi Syarat-
Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Dalam Ilmu Syariah

Oleh :

Muhammad Gufron Juniansyah

NPM : 1921020633

Pembimbing 1 : Agustina Nurhayati, S.Ag, M.H.

Pembimbing 2 : Dr. Hervin Yoki Pradikta, S.H.I, M.H.I

Program Studi : Hukum Tata Negara (*Siyasah Syar'iyah*)

**FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
1445 H/2024 M**

PEDOMAN TRANSLITERASI

Konsonan

No	Arab	Latin	No	Arab	Latin
1	ا	-	16	ط	ṭ
2	ب	b	17	ظ	ẓ
3	ت	t	18	ع	‘
4	ث	ṯ	19	غ	g
5	ج	j	20	ف	f
6	ح	ḥ	21	ق	q
7	خ	kh	22	ك	k
8	د	d	23	ل	l
9	ذ	ẓ	24	م	m
10	ر	r	25	ن	n
11	ز	z	26	و	w
12	س	s	27	هـ	h
13	ش	sy	28	ء	‘
14	ص	ṣ	29	ي	y
15	ض	ḍ			

Vokal Pendek	Vokal Panjang	Diftong
كَتَبَ = kataba	قَالَ = qāla	كَيْفَ = kaifa
سُئِلَ = su'ila	قِيلَ = qīla	حَوْلَ = ḥaula
يَذْهَبُ = yazhabu	يَقُولُ = yaqūlu	

ABSTRAK

Letak Provinsi Lampung yang strategis membawa pengaruh yang cukup besar bagi kehidupan masyarakat Lampung salah satunya di Pulau Pasaran. Pulau yang terletak di wilayah Kelurahan Kota Karang, Kecamatan Teluk Betung Timur, Kota Bandar Lampung ini memiliki banyak potensi yang harus dilestarikan untuk kelangsungan budidaya perikanan laut. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 12 Tahun 2014 Tentang Optimalisasi Pemanfaatan Sumber Daya Kelautan diciptakan guna untuk memberikan ruang pengaturan oleh Pemerintah Provinsi Lampung melalui pemanfaatan secara bijaksana, bertanggung jawab, adil, partisipatif, dan berkelanjutan terhadap sumberdaya kelautan dan perikanan untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat yang sebesar-besarnya, percepatan pembangunan daerah, dan kelangsungan makhluk hidup lainnya.

Jenis penelitian ini menggunakan metode kualitatif dimana penulis melakukan penelitian lapangan (*field research*) yang dilakukan dengan mencari data melalui survei langsung ke lapangan sehingga penulis bisa secara langsung melakukan observasi. Sifat penelitian ini adalah deskriptif analisi karena dianggap sesuai untuk pencarian suatu pemecahan masalah. Sumber data diperoleh secara primer, melalui wawancara dan observasi yang langsung dikumpulkan oleh peneliti yang bersumber pada pertanyaan (*interview*) terhadap responden. Dan data sekunder yang berbentuk dokumen-dokumen resmi, peraturan daerah, undang-undang, jurnal ilmiah, skripsi dan buku-buku yang membahas tentang penelitian ini.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Implementasi Pasal 25 Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 12 Tahun 2014 Tentang Optimalisasi Pemanfaatan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan di Pulau Pasaran oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung sudah terlaksana dengan baik dengan adanya kegiatan pembinaan, penyuluhan maupun sosialisasi yang dilakukan pada masyarakat yang tergabung dalam sektor perikanan di Pulau Pasaran dan Perspektif *Fiqh Siyasah* Terhadap Implementasi Pasal 25 Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 12 Tahun 2014 Tentang Optimalisasi Pemanfaatan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan di Pulau Pasaran sudah sejalan dengan kaidah *Fiqh Siyasah* dimana kebijakan yang dilaksanakan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung dapat mendatangkan kemaslahatan bagi banyak orang, sehingga

konsep dan aturan yang berlaku sesuai dengan *Fiqh Siyisah Tanfidziyah* dan norma-norma hukum Islam.

Kata kunci : Pulau Pasaran, *Fiqh Siyisah*, Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung



ABSTRACT

The strategic location of Lampung Province has a considerable influence on the lives of the people of Lampung in coastal areas. One of them is Pulau Pasaran. The island which is located in the Teluk Lampung area and administratively included in the Kelurahan Kota Karang, Kecamatan Teluk Betung Timur, Kota Bandar Lampung, has a lot of potential that must be preserved for the continuity of marine fisheries cultivation, so that the community's economic activity can develop rapidly so that it has a significant impact with Increased community welfare. Lampung Province Regional Regulation Number 12 of 2014 concerning Optimization of the Utilization of Marine Resources was created in order to provide regulatory space by the Lampung Provincial Government through wise, responsible, fair, participatory, and sustainable use of marine and fisheries resources to realize the welfare of the people. The amount, the acceleration of regional development, and the survival of other living things.

This type of research uses a qualitative method where the author conducts field research conducted by finding data through direct surveys to the field so that the author can directly make observations. The nature of this research is descriptive analyst because it is considered suitable for the search for a problem solving. Data sources are obtained primary, through interviews and observations that are directly collected by researchers sourced from questions (interviews) of respondents. And secondary data in the form of official documents, regional regulations, laws, scientific journals, thesis and books that discuss this research.

The results of the research show that the implementation of Article 25 Regional Regulation of Lampung Province Number 12 of 2014 concerning Optimization of Utilization Marine and Fisheries Resources by the Lampung Province Maritime and Fisheries Office have been carried out well with the existence of coaching, counseling and socialization activities carried out on the community incorporated in the fisheries sector on the Pulau Pasaran and the Perspective of Fiqh Siyasa on the Implementation of Article 25 of the Provincial Regional Regulation Lampung Number 12 of 2014 concerning Optimization of the Utilization of Marine and Fisheries Resources on the Pulau Pasaran is in line with the rules of Fiqh Siyasa where the

policies implemented by the Lampung Province Maritime and Fisheries Office can bring benefit to many people, so that the concepts and rules in accordance with Fiqh Siyarah Tanfidziyah and norms of Islamic law.

Keyword : *Pulau Pasaran, Fiqh Siyarah, Lampung Province Maritime and Fisheries Office*



SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Muhammad Gufron Juniansyah
NPM : 1921020633
Jurusan/prodi : Hukum Tata Negara (*Siyasah Syar'iyah*)
Fakultas : Syariah

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul : **"Implementasi Pasal 25 Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 12 Tahun 2014 Tentang Optimalisasi Pemanfaatan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (Studi di Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung)"** adalah benar-benar merupakan hasil karya penyusun sendiri, bukan duplikasi ataupun salinan dari karya orang lain kecuali pada bagian telah dirujuk dan disebut dalam footnote atau daftar pustaka. Apabila di lain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penyusun.

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi

Bandar Lampung 27 November 2023

Penulis,



Muhammad Gufron Juniansyah

NPM.1921020633



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARI'AH**

Alamat : Jl. Letkol H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung Tlp. (0721) 703289

PERSETUJUAN

**Judul Skripsi : Implementasi Pasal 25 Peraturan Daerah
Provinsi Lampung Nomor 12 Tahun 2014
Tentang Optimalisasi Pemanfaatan Sumber
Daya Kelautan dan Perikanan (Studi di Dinas
Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung**

**Nama : Muhammad Gufron Juniansyah
NPM : 1921020633
Prodi : Hukum Tata Negara (*Siyasah Syar'iyah*)
Fakultas : Syari'ah**

MENYETUJUI

Untuk dimunaqosyahkan dan dipertahankan dalam Sidang Munaqosah
Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung

Pembimbing I

Pembimbing II

Agustina Nurhayati, S. Ag., M.H.

Dr. Hervin Yoki Pradikta, S.H.I, M.H.I.

NIP. 1974081620031220004

NIP. 198802182018011002

Ketua Prodi Hukum Tata Negara

Frenki, M.Si.

NIP. 198003152009011017



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat : Jl. Letkol H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung Tlp. (0721) 703289

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **“Implementasi Pasal 25 Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 12 Tahun 2014 Tentang Optimalisasi Pemanfaatan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Perspektif Fiqh Siyash (Studi di Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung)”**. Disusun oleh Muhammad Gufron Juniansyah, NPM: 1921020633, Program Studi: Hukum Tatanegara (*Siyash Syar’iyah*), telah di Ujikan dalam sidang Munaqosyah di Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung pada Hari/Tanggal: **Senin, 04 Maret 2024**

TIM PENGUJI

Ketua : Dr. Mohammad Yasir Fauzi, M.H

Sekretaris : Mirah Satria Alamsyah, S. IP, M.A, J.D

Penguji I : Dr. Zuhraini, S.H, M.H

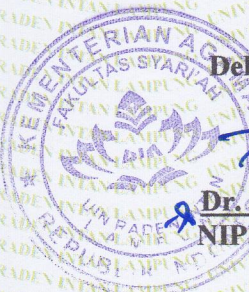
Penguji II : Agustina Nurhayati, S.Ag, M.H

Penguji III : Dr. Hervin Yoki Pradikta, M.H.I

**Mengetahui
Dekan Fakultas Syariah**

Dr. Efa Rodiah Nur, M.H

NIP. 196908081993032002



MOTTO

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ
النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ
إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

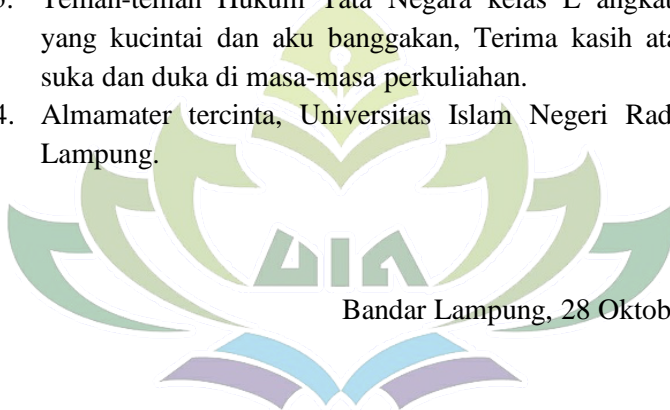
*Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada
pemiliknya. Apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia,
hendaklah kamu tetapkan secara adil. Sesungguhnya Allah
memberi pengajaran yang paling baik kepadamu.
Sesungguhnya Allah Maha Mendengar
lagi Maha Melihat.
(An-Nisa'/4:58)*



PERSEMBAHAN

Alhamdulillahirabbil'alamin, dengan menyebut nama Allah SWT atas segala cinta dan kasihnya yang telah memberikan kekuatan, ketabahan serta menuntun hamba dalam menyelesaikan skripsi yang akan dipersembahkan untuk:

1. Kedua orang tua tercinta, Bapak Suparno dan Ibu Khodijah atas doa dan dukungan yang tiada henti kalian panjatkan untukku selama ini.
2. Kakak-Kakakku tersayang, Rini Noviyanti, Dian Agustina, Hendra Kusuma, Adi Hudaya, Selviana Khodijah, dan Asep Kurniawan atas bimbingannya dan dukungannya.
3. Teman-teman Hukum Tata Negara kelas L angkatan 2019 yang kucintai dan aku banggakan, Terima kasih atas segala suka dan duka di masa-masa perkuliahan.
4. Almamater tercinta, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.



Bandar Lampung, 28 Oktober 2023

Muhammad Gufron Juniansyah
NPM.1921020633

RIWAYAT HIDUP

Penulis bernama Muhammad Gufron Juniansyah lahir di Teluk Betung pada tanggal 26 Juni 2001. Anak ke-lima dari pasangan Bapak Suparno dan Ibu Khodijah. Penulis memiliki 4 orang kakak kandung yang bernama Rini Noviyanti, Dian Agustina, Adi Hudaya, dan Asep Kurniawan. Penulis memulai pendidikan di SDN 1 Keteguhan pada tahun 2007-2013, SMPN 6 Bandar Lampung pada tahun 2013-2016, SMAN 2 Bandar Lampung pada tahun 2016 kemudian lulus pada tahun 2019, dan ditahun yang sama penulis melanjutkan pendidikan tingkat Strata 1 di Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung dengan mengambil program studi Hukum Tata Negara (*siyasah syar'iyah*).

Bandar Lampung, 28 Oktober 2023



Muhammad Gufron Juniansyah
NPM. 1921020633

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, segala puji syukur bagi Allah SWT tuhan semesta alam Yang Maha Pengasih dan Penyayang, dan shalawat teriring salam semoga selalu tercurahkan kepada baginda kita, Nabi Muhammad SAW. Semoga kitaselalu tergolong sebagai umatnya.

Adapun judul skripsi saya “Implementasi Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 12 Tahun 2014 Tentang Optimalisasi Pemanfaatan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Perspektif Fiqh Siyash (Studi di Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung)”. Penyusunan skripsi ini dapat terselesaikan berkat bantuan dan dukungan serta motivasi dari berbagai pihak, dibalik terselesaikannya skripsi ini, penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini.

1. Bapak Prof. H. Wan Jamaluddin Z, M.Ag., Ph.D. Rektor Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
2. Ibu Efa Rodiah Nur, M.H. Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
3. Bapak Frenki, M.Si. selaku Ketua Prodi Hukum Tatanegara dan Bapak Dr. Fathul Mu'in, M.H.I. selaku Sekretaris Prodi Hukum Tatanegara.
4. Ibu Agustina Nurhayati, S.Ag, M.H. selaku Pembimbing I dan Bapak Dr. Hervin Yoki Pradikta, S.H.I, M.H. selaku pembimbing II.
5. Bapak/Ibu Dosen dan seluruh Staf Karyawan Fakultas Syariah yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan administrasi selama masa perkuliahan.
6. Ibu Ir. Liza Derni M.M selaku Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Lampung, dan Bapak Dr. Aprizal Arsyita, S.St.Pi, M.H, selaku Ketua Tim Kerja Pengelolaan Sumber Daya Ikan.
7. Masyarakat Pulau Pasaran yang telah bersedia menjadi Narasumber Penelitian ini.

8. Rekan-rekan seperjuangan, Anggun Puspita, Hasyim Trio, Ary Darmawan, Imam Siregar, Rizal Wahyudi, Risyad Ilmiadi, Naufal Daffa, Andara, Ahmad Hamzah, dan Eka Putra yang selalu memberikan motivasi dan membantu mewarnai hitam putih nya dunia perkuliahan selama ini.
9. Sahabat-sahabatku tercinta, Fira Yolanda, Khumaidi Irsyad, Andira Rusaida, Okta Widayanti, Silvia Ramada, Anisa Adelita, Alfin Raihan, Cinta Cherelya, Putri Wulandari, Chalista Teduh dan Alkhadaffi Sadam atas dukungan dan dorongan dalam penyusunan skripsi ini.
10. Kepada semua pihak yang ikut andil dalam penyusunan skripsi ini dan tidak dapat disebutkan satu persatu.

Penulis sadar bahwa dalam penulisan skripsi ini masih terdapat kekurangan dan kesalahan semata-mata karena keterbatasan pengetahuan dan pengalaman yang dimiliki penulis. Karena itu, perlu adanya saran dan kritik membangun dari para pembaca. Diharapkan skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis, masyarakat dan dapat menjadi khazanah dalam bidang ilmu tata Negara. Semoga Allah SWT senantiasa meridhoi amal baik dan jasa yang telah diberikan kepada penulis, Aamiin ya Rabbal'alamin.

Wasaalamualaikum Wr.Wb.



Bandar Lampung, 28 Oktober 2023

Muhammad Gufron Juniansyah
NPM. 1921020633

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	ii
ABSTRAK	iii
SURAT PERNYATAAN	vii
PERSETUJUAN.....	viii
PENGESAHAN	ix
MOTTO	x
PERSEMBAHAN.....	xi
RIWAYAT HIDUP	xii
KATA PENGANTAR.....	xiii
DAFTAR ISI.....	xv
DAFTAR TABEL.....	xvii
DAFTAR GAMBAR	xviii
BAB 1 PENDAHULUAN.....	1
A. Penegasan Judul.....	1
B. Latar Belakang Masalah	2
C. Fokus dan Sub Fokus	6
D. Rumusan Masalah	6
E. Tujuan Penelitian	7
F. Manfaat Penelitian	7
G. Kajian Terdahulu Yang Relevan.....	7
H. Metode Penelitian	12
I. Sistematika Pembahasan	16
BAB II LANDASAN TEORI.....	19
A. Fiqh Siyasah	19
1. Pengertian Fiqh Siyasah	20
2. Ruang Lingkup Fiqh Siyasah.....	21
3. Pengertian Siyasah Tanfidziyah.....	22
B. Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	25
1. Pengertian Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	25
2. Pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan	27
3. Dasar Hukum Pembinaan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan.....	31

BAB III LAPORAN HASIL PENELITIAN.....	33
A. Sejarah Pulau Pasaran.....	33
B. Gambaran Umum di Pulau Pasaran Kel. Kota Karang, Kec. Teluk Betung Timur, Kota Bandar Lampung.	33
C. Tugas Pokok, Fungsi, Visi dan Misi Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung.	37
D. Struktur Organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung.	38
E. Rencana Kerja Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung Tahun 2023.....	41
F. Implementasi Pasal 25 Peraturan Daerah Provinsi Nomor 12 Tahun 2014 Tentang Optimalisasi Pemanfaatan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan di Pulau Pasaran.	48
BAB IV ANALISIS DATA	57
A. Analisis Implementasi Pasal 25 Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 12 Tahun 2014 Tentang Optimalisasi Pemanfaatan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan di Pulau Pasaran.	57
B. Perspektif Fiqh Siyasah Terhadap Implementasi Pasal 25 Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 12 Tahun 2014 Tentang Optimalisasi Pemanfaatan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan di Pulau Pasaran.	59
BAB V PENUTUP	65
A. Kesimpulan.....	65
B. Rekomendasi	65
DAFTAR RUJUKAN.....	67

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1. Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur di Pulau Pasaran	35
Tabel 3.2. Jumlah Penduduk Berdasarkan Tingkat Pendidikan.....	35
Tabel 3.3. Jumlah Penduduk Berdasarkan Mata Pencaharian Masyarakat	36
Tabel 3.4. Struktur Organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung	38
Tabel 3.5. Analisis SWOT Penyusunan dan Pelaksanaan Program Kegiatan Dinas Kelautan dan Perikanan	46



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1. Peta Pulau Pasaran 34



BAB 1

PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Skripsi ini berjudul “Implementasi Pasal 25 Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 12 Tahun 2014 Tentang Optimalisasi Pemanfaatan Sumber Daya Kelautan Dan Perikanan Perspektif *Fiqh Siyasa*” Maka dari itu agar tidak terjadi kesalahpahaman dari para pembaca, perlu diuraikan pengertian dari istilah judul tersebut sebagai berikut :

1. Implementasi adalah penerapan gagasan dengan arti yang cukup luas. Implementasi adalah praktik mendasar untuk menerapkan strategi atau tujuan kegiatan apapun. Tujuan dari rencana implementasi adalah untuk menerapkan strategi dengan perencanaan yang sudah dianggap sempurna dan matang.¹
2. Pasal 25 Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 12 Tahun 2014 Tentang Optimalisasi Pemanfaatan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan yang berbunyi:
 - a. Pembinaan sumber daya kelautan dan perikanan dalam wilayah laut yurisdiksi Provinsi Lampung ditujukan kepada tercapainya manfaat yang sebesar-besarnya masyarakat, terutama masyarakat nelayan Provinsi, dan akselerasi pembangunan daerah Provinsi Lampung.
 - b. Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Provinsi Lampung melaksanakan pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan bagi kesejahteraan dan kemakmuran rakyat Indonesia di Provinsi Lampung.²
3. Perspektif adalah cara pandang, pendapat, gagasan, ide, kaidah, atau buah pikir secara spesifik dalam menyimpulkan suatu fenomena tertentu yang akan dikaji.

¹Anugerah Ayu Sendari, Implementasi adalah Pelaksanaan Tujuan, Pahami Pengertian dan Contohnya, Publik, 2021.

²Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 12 Tahun 2014 *Tentang Optimalisasi Pemanfaatan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan* (2014): 1–10.

4. *Fiqh Siyasa* adalah ilmu tata negara yang bernafaskan atau sejalan dengan ajaran Islam yang membicarakan penerapan hukum, kebijakan oleh pemegang kekuasaan, pengaturan maupun pengurusan kehidupan manusia dalam bernegara.³ ilmu tata negara islam yang secara spesifik membahas tentang seluk beluk pengaturan kepentingan umat manusia pada umumnya dan negara pada khususnya, berupa penetapan hukum, peraturan, dan kebijakan guna mewujudkan kemaslahatan bagi manusia.

Berdasarkan beberapa uraian istilah yang terdapat dalam judul diatas, maka yang dimaksud dalam judul skripsi ini adalah “Implementasi Pasal 25 Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 12 Tahun 2014 Tentang Optimalisasi Pemanfaatan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Perspektif Fiqh Siyasa” yang bertujuan untuk mengetahui peran Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung dalam menjalankan tugasnya.

B. Latar Belakang Masalah

Indonesia dikenal sebagai negara kepulauan (*Archipelagic State*), artinya negara yang sebagian besar wilayahnya dilalui perairan yang luas serta terdapat gugusan pulau-pulau besar maupun kecil. Sedangkan menurut UNCLOS (*United Nations Convention On The Law Of The Sea*) negara kepulauan adalah suatu negara yang seluruhnya terdiri dari satu atau lebih gugusan kepulauan dan dapat mencakup pulau-pulau lain. Sebagai salah satu negara kepulauan terbesar di dunia, Indonesia adalah salah satu negara yang menerima persetujuan dari PBB (Persatuan Bangsa-Bangsa) sebagai negara kepulauan dalam Konvensi Hukum Laut pada tahun 1982.⁴ Memiliki luas laut sekitar 7,6 juta km dan terdapat kurang lebih 17.504 pulau, Indonesia memiliki potensi kekayaan laut yang amat melimpah, kekayaan tersebut bisa dilihat dengan adanya 8.500 spesies ikan, 555 spesies rumput laut dan 950 biota terumbu karang. Hal ini menjadi tantangan

³Nur Ahmad Fadhil Lubis, *Islamic Encyclopedia*, (Malang: PT Ichtiar Baru Van Hoeve, 1993), 73.

⁴M-30, «Kenali UNCLOS, Dasar Hukum Internasional untuk Kedaulatan Indonesia di Natuna», Publik, 2020.

tersendiri bagi pemerintah maupun masyarakat untuk ikut andil dalam mengelola dan menjaga potensi kekayaan maritim di wilayah Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia.⁵ Sebagai salah satu Daerah yang hampir seluruh wilayahnya dilintasi garis pantai dengan panjang 1.105 km, dan terdapat 69 pulau-pulau kecil, Provinsi Lampung memiliki banyak potensi yang harus dilestarikan untuk kelangsungan budidaya perikanan laut yang salah satunya terdapat di Pulau Pasaran. Pulau Pasaran adalah sebuah pulau yang terletak di area Teluk Lampung dan secara administratif masuk dalam wilayah Kelurahan Kota Karang, Kecamatan Teluk Betung Timur, Kota Bandar Lampung. Dengan luas sekitar 12 hektar, sebagian besar warganya bermata pencaharian sebagai Nelayan dan terdapat sekitar 50 pengolah ikan asin sehingga dapat menghasilkan 4 sampai 8 ton ikan asin tiap harinya serta memasok kebutuhan ikan asin secara nasional.⁶ Tentunya hal ini menjadi tantangan tersendiri bagi pemerintah Provinsi Lampung dalam mengelola potensi yang ada di Pulau Pasaran agar terus berperan dalam perekonomian baik secara regional maupun nasional.⁷

Pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan di perairan Teluk Lampung yang dilakukan oleh nelayan setempat belum terlalu optimal, karena sarana dan prasarana pendukung dirasa belum tercukupi, keterbatasan sarana dan prasarana menjadi salah satu penghambat pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan yang ada di Pulau Pasaran. Fasilitas sarana dan prasarana dasar sangat dibutuhkan oleh masyarakat setempat untuk mendukung keberhasilan sektor usaha serta kelancaran produksi dan distribusi barang dan jasa ke wilayah pesisir.⁸

⁵Amiek Soemarmi et al., “*Pengertian ‘Negara Kepulauan’ Dalam Negara Kepulauan Indonesia Berasal Pengertian Nusantara.*” *Jilid 48*, No. 3 (Juli 2019): 2042.

⁶Mahrus Ali, “*Potensi Wisata Bahari Pulau Pasaran Bandar Lampung.*” *Prosiding Seminar Nasional Swasembada Pangan*, (April 2015): 570.

⁷Patel, “*Studi Keberadaan Ikan Asin.*” (2017):3.

⁸Georgius Panji, Indarja, and Amiek Soemarmi, “*Tugas Dan Wewenang Dinas Kelautan Perikanan Dalam Pengelolaan Usaha Perikanan Di Provinsi Lampung.*” *Diponegoro Law Journal* Vol 5, no. 3 (2016): 11, <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/dlr/article/view/12584>.

Kemudian, permasalahan berikutnya yaitu adanya pencemaran serta kerusakan lingkungan laut sehingga kualitas dan kuantitas tangkapan ikan berkurang yang menyebabkan para nelayan harus mencari ikan lebih jauh hingga ke perairan sekitar Gunung Krakatau. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana peran Pemerintah Daerah Provinsi Lampung dalam mengimplementasikan pasal 25 Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 12 Tahun 2014 Tentang Optimalisasi Pemanfaatan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan yang berbunyi :

1. Pembinaan sumber daya kelautan dan perikanan dalam wilayah laut yurisdiksi Provinsi Lampung ditujukan kepada tercapainya manfaat yang sebesar-besarnya bagi masyarakat, terutama masyarakat nelayan Provinsi, dan akselerasi pembangunan daerah Provinsi Lampung.
2. Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Provinsi Lampung melaksanakan pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan bagi kesejahteraan dan kemakmuran rakyat Indonesia di Provinsi Lampung.

Melihat potensi sumber daya perikanan di Pulau Pasaran yang cukup menjanjikan, namun masih diselimuti berbagai macam persoalan maka harus ada langkah-langkah konkrit dari semua *stakeholder* yang bersangkutan untuk mengatasi masalah di atas untuk menggenjot produksi dan distribusi perikanan yang berkelanjutan di Pulau Pasaran tersebut.⁹Islam menjelaskan dalam Al-Qurán bahwa betapa pentingnya menjaga kelestarian dan keseimbangan alam maupun lautan sebagaimana yang tertera pada QS. An-Nahl ayat 14 yang berbunyi :

⁹Muhimmatus Sa'adah, "*Strategi Optimalisasi Pengelolaan Sumber Daya Perikanan Dan Kelautan Daerah,*" *Jurnal Administrasi Publik* Vol 1, no. 8 (October 2013), <http://administrasipublik.studentjournal.ub.ac.id/index.php/jap/article/view/251>.

وَهُوَ الَّذِي سَخَّرَ الْبَحْرَ لِتَأْكُلُوا مِنْهُ لَحْمًا طَرِيًّا وَتَسْتَخْرِجُوا مِنْهُ حِلْيَةً تَلْبَسُونَهَا وَتَرَى الْفُلْكَ مَوَازِرَ فِيهِ وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ
وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴿١٤﴾

“Dialah yang menundukkan lautan (untukmu) agar kamu dapat memakan daging yang segar (ikan) darinya dan (dari lautan itu) kamu mengeluarkan perhiasan yang kamu pakai. Kamu (juga) melihat perahu berlayar padanya, dan agar kamu mencari sebagian karunia-Nya, dan agar kamu bersyukur.”

Makna dari surat An-Nahl ayat 14 tersebut menurut Kementerian Agama RI dan Syaikh Abdurrahman bin Nashir as-sa'idi yaitu hal ini dimaksudkan agar kamu dapat menangkap ikan-ikannya dan memakan daging yang segar darinya, dan dari lautan itu pula kamu dapat mengeluarkan benda-benda yang bernilai tinggi, seperti mutiara, permata, dan semacamnya untuk menjadi perhiasan yang kamu pakai. kamu serta memanfaatkannya sesuai tujuan penciptaannya.¹⁰

Allah SWT telah memberikan bagi hamba hamba-Nya hal hal yang menjadi kemaslahatan dan kepentingan mereka, melebihi apa yang mereka cari dan lebih tinggi daripada sesuatu yang mereka harapkan. Wacana fiqh siyasah yang mengenai kekuasaan eksekutif atau *tanfidziyah* yang bertugas melaksanakan undang-undang serta kebijakan pemerintah yang menghasilkan kemaslahatan umat terkandung dalam Al-Qur'an dan sunnah Nabi, dengan demikian unsur-unsur legislasi dalam Islam meliputi; pemerintah sebagai pemegang kekuasaan untuk menetapkan hukum yang akan diberlakukan dalam masyarakat Islam.

Jadi, dalam *siyasah tanfidziyah* pemerintah memegang peran penting dalam roda pemerintahan negara untuk mengatur rakyatnya sejahtera melalui undang-undang. Dari uraian di atas, dapat ditemukan permasalahan terkait dengan “**Implementasi**

¹⁰Kementerian Agama RI, «Q.S An-Nahl (16) ayat 14», s.d.

Pasal 25 Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 12 Tahun 2014 Tentang Optimalisasi Pemanfaatan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Menurut Fiqh Siyasah.

C. Fokus dan Sub Fokus

1. Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka fokus kajian penelitian ini dibatasi hanya dalam lingkup Implementasi Pasal 25 Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 12 Tahun 2014 Tentang Optimalisasi Pemanfaatan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan dalam Perspektif *Fiqh Siyasah* di Pulau Pasaran.

2. Sub Fokus Penelitian

Dengan demikian ini yang menjadi subfokus dalam penelitian ini adalah :

- a. Implementasi Pasal 25 Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 12 Tahun 2014 Tentang Optimalisasi Pemanfaatan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan di Pulau Pasaran.
- b. Perspektif *Fiqh Siyasah* terhadap implementasi Pasal 25 Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 12 Tahun 2014 Tentang Optimalisasi Pemanfaatan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan di Pulau Pasaran.

D. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana Implementasi Pasal 25 Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 12 Tahun 2014 Tentang Optimalisasi Pemanfaatan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan di Pulau Pasaran?
2. Bagaimana Perspektif *Fiqh Siyasah* terhadap Implementasi Pasal 25 Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 12 Tahun 2014 Tentang Optimalisasi Pemanfaatan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan di Pulau Pasaran ?

E. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui Implementasi Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung dalam mengimplementasikan Pasal 25 Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 12 Tahun 2014 Tentang Optimalisasi Pemanfaatan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan di Pulau Pasaran.
2. Untuk mengetahui Perspektif *Fiqh Siyasah* terhadap Implementasi Pasal 25 Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 12 Tahun 2014 Tentang Optimalisasi Pemanfaatan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan di PulauPasaran.

F. Manfaat Penelitian

1. Secara teoritis
Penelitian ini diharapkan menjadi kontribusi sebagai bahan masukan dan pertimbangan bagi masyarakat Pulau Pasaran, Kelurahan Kota Karang, Kecamatan Teluk Betung Timur, Kota Bandar Lampung guna untuk memperluas khazanah ilmu pengetahuan dalam menyempurnakan teoriyang sudah ada sebelumnya.
2. Secara praktis
Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk penulis sendiri serta Seluruh pihak-pihak yang terkait dalam hal ini baik masyarakat, pemerintah maupun Penegak hukum tentang implemmentasi Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 12 Tahun 2014 Tentang Optimalisasi Pemanfaatan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan.

G. Kajian Terdahulu Yang Relevan

1. Skripsi oleh Effendi (2019) UIN Raden Intan Lampung yang berjudul “*Upaya Kelompok Nelayan Welas Asih Dalam Pemberdayaan Ekonomi Anggota Di Pulau Pasaran, Kel. Kota Karang, Kec.Teluk Betung Timur, Kota Bandar Lampung*”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui upaya kelompok dalam pemberdayaan ekonomi anggota. Berdasarkan penelitian yang dilakukan, peneliti menemukan temuan sebagai berikut: untuk mengembangkan potensi

nelayan di bidang pengolahan ikan asin teri, dilakukan dengan pembentukan kelompok. Dalam proses, ada beberapa tahapan yaitu: sosialisasi oleh Bank Indonesia, pembentukan kelompok ini merupakan syarat penting dalam penerimaan bantuan dan fasilitas dari Bank Indonesia, proses pemberdayaan guna memberikan permodalan serta pengetahuan, skill serta pelatihan-pelatihan yang dilakukan oleh kelompok nelayan welas asih serta evaluasi dan monitoring dilakukan untuk mengetahui adanya perubahan serta memperbaiki kesalahan yang ada serta pemantauan guna tetap berlanjutnya suatu program. Hasil penelitian ini adalah menunjukkan bahwa upaya kelompok nelayan welas asih dalam pemberdayaan ekonomi anggota cukup berhasil dengan melihat hasil dari peningkatan pendapatan dari setiap anggota.¹¹

Persamaan antarkeduanya yaitu objek yang dibahas berfokus pada permasalahan yang ada di Pulau Pasaran. Sedangkan perbedaannya yaitu, skripsi oleh saudara Effendi di atas membahas tentang Upaya Kelompok Nelayan Welas Asih Dalam Pemberdayaan Ekonomi, sedangkan penelitian ini membahas tentang Implementasi Perda Provinsi Lampung Tentang Optimalisasi Pemanfaatan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Menurut Perspektif *Fiqh Siyasah*.

2. Skripsi oleh Ardian Nur (2020) UIN Raden Intan Lampung yang berjudul “*Analisis Fiqh Siyasah Terhadap Peran Dinas Kelautan Dan Perikanan Kabupaten Pesisir Barat Dalam Meningkatkan Penghasilan Nelayan Tradisional Di Kecamatan Pesisir Tengah*” Permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini ada dua yaitu bagaimana peran Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pesisir Barat dalam meningkatkan penghasilan nelayan tradisional di Kecamatan Pesisir Tengah dan bagaimana pandangan fiqh siyasah terhadap peran Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pesisir Barat dalam

¹¹Effendi, “*Upaya Kelompok Nelayan Welas Asih Dalam Pemberdayaan Ekonomi Anggota Di Pulau Pasaran Kelurahan Kota Karang, Kecamatan Teluk Betung Timur Kota Bandar Lampung,*” (Skripsi, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2019), <https://doi.org/1037//0033-2909.I26.1.78>.

meningkatkan penghasilan nelayan tradisional di Kecamatan Pesisir Tengah. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan dengan menggunakan data primer dan data sekunder. Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan metode observasi, wawancara dan dokumentasi. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis kualitatif.¹²

Persamaan keduanya adalah membahas mengenai peran Dinas Kelautan dan Perikanan daerah dalam menjalankan tugasnya serta memilih *Fiqh Siyasah* sebagai landasan teorinya. Sedangkan perbedaannya yaitu, skripsi oleh saudara Ardian Nur membahas tentang Analisis *Fiqh Siyasah* Terhadap Peran Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pesisir Barat Dalam Meningkatkan Penghasilan Nelayan Tradisional di Kecamatan Pesisir Tengah, sedangkan penelitian ini membahas tentang Implementasi Perda Provinsi Lampung Nomor 12 Tahun 2014 Tentang Optimalisasi Pemanfaatan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Menurut Perspektif *Fiqh Siyasah*.

3. Skripsi oleh Enggla Novia Gusyani (2019) Universitas Andalas yang berjudul “*Implementasi Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 4 Tahun 2012 tentang Pengelolaan dan Perlindungan Sumberdaya Ikan*”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Implementasi Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 4 Tahun 2012 tentang Pengelolaan dan Perlindungan Sumberdaya Ikan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat telah dilaksanakan dengan menghadapi beberapa kendala yakni kurangnya jumlah SDM dalam mengimplementasi perda ini, kemudian sarana dan prasarana belum mencukupi yakni kurangnya jumlah unit kapal, yang ada untuk melakukan pengawasan perairan dan perikanan dalam pelaksanaan perda ini. komunikasi dan koordinasi antara Dinas Kelautan dan

¹²Ardian Nur, “*Analisis Fiqih Siyasah Terhadap Peran Dinas Klautan Dan Perikanan Kabupaten Pesisir Barat Dalam Meningkatkan Penghasilan Nelayan Tradisional Di Kecamatan Pesisir Tengah*” (Skripsi, UIN Raden Intan Lampung, 2020).

Perikanan Provinsi Sumatera Barat dengan mitra kerja yakni TNI AL dan Polisi Perairan sudah sangat baik dalam melaksanakan pengawasan penangkapan ikan.¹³

Persamaannya adalah kedua penelitian tersebut membahas tentang implementasi atau penerapan suatu Peraturan Daerah tentang pengelolaan sumberdaya perikanan. Sedangkan perbedaannya yaitu, skripsi oleh Enggla Novia Gusyani membahas tentang Implementasi Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 4 Tahun 2012 tentang Pengelolaan dan Perlindungan Sumberdaya Ikan sedangkan penelitian ini membahas tentang Implementasi Perda Provinsi Lampung Nomor 12 Tahun 2014 Tentang Optimalisasi Pemanfaatan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Menurut Perspektif *Fiqh Siyash*.

4. Jurnal oleh Debi Hardian, Indra Gumay Febryano, Supono, Abdullah Aman Damai, dan Gunardi Djoko Winarno (2021) yang berjudul “*Pelarangan Cantrang: Strategi Pengembangan Keberlanjutan Sumberdaya Ikan di Teluk Lampung*”. Tujuan penelitian adalah untuk menganalisis strategi pengembangan implementasi kebijakan pelarangan alat tangkap cantrang di Teluk Lampung. Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara, observasi dan studi dokumentasi. Data yang terkumpul selanjutnya dianalisis kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman menggunakan Analisis SWOT untuk strategi pengembangan implementasi kebijakannya. Hasil penelitian menunjukkan strategi yang terpilih adalah strategi yang memanfaatkan kekuatan dengan mengurangi ancaman yang ada. Strategi ini mendukung strategi diversifikasi melalui peningkatan

¹³Enggla Novia Gusyani, «Implementasi Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 4 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Dan Perlindungan Sumberdaya Ikan», *Diploma Tesis, Universitas Andalas*, 2019, 2-4, [Http://Scholar.Unand.Ac.Id/Id/Eprint/49006](http://Scholar.Unand.Ac.Id/Id/Eprint/49006).

kepatuhan nelayan dalam penggunaan alat tangkap ikan dan peningkatan lapangan kerja.¹⁴

Persamaan kedua penelitian tersebut berfokus pada peran Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung dalam mengelola dan menjaga keutuhan sumberdaya perikanan di Provinsi Lampung. Sedangkan perbedaannya adalah jurnal oleh Debi Hardian, Indra Gumay Febryano, Supono, Abdullah Aman Damai, dan Gunardi Djoko Winarno (2021) membahas tentang Pelarangan Cantrang: Strategi Pengembangan Berkelanjutan Sumberdaya Perikanan di Teluk Lampung, sedangkan penelitian ini membahas tentang Implementasi Perda Provinsi Lampung Nomor 12 Tahun 2014 Tentang Optimalisasi Pemanfaatan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Menurut Perspektif *Fiqh Siyasa*.

5. Jurnal oleh Siti Hajar Sitorus, Mukhamad Fatkhullah, Rifda Julastri (2022) Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang berjudul “*Pemberdayaan Masyarakat Nelayan; Peran Dan Kontribusi Dinas Perikanan Dan Kelautan Kabupaten Rokan Hilir*”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran dan kontribusi Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Rokan Hilir dalam pemberdayaan melalui kebijakan dan program kerja pada kurun waktu 2016-2018. hasil penelitan menunjukkan bahwa dari 10 program dan 61 kegiatan, peran Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Rokan Hilir dalam pemberdayaan masyarakat dapat dilihat melalui: (1) Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir, (2) Program Peningkatan Budaya Kelautan dan Wawasan Maritim kepada Masyarakat, (3) Program Pengembangan Budidaya Perikanan, (4) Program Pengembangan Perikanan Tangkap serta, (5) Program

¹⁴Debi Hardian et al., «Pelarangan Cantrang: Strategi Pengembangan Keberlanjutan Sumberdaya Ikan Di Teluk Lampung», *Journal of Tropical Marine Science* 3, núm. 1 (2020): 21-27, <https://doi.org/10.33019/jour.trop.mar.sci.v3i1.1734>.

Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan.¹⁵

Persamaan keduanya yaitu, berisi tentang peran Dinas Kelautan dan Perikanan daerah setempat dalam memenuhi tugas dan kewajibannya. Sedangkan perbedaannya yaitu, jurnal oleh Siti Hajar Sitorus, Mukhamad Fatkhullah, Rifda Julastri membahas tentang Pemberdayaan Masyarakat Nelayan; Peran Dan Kontribusi Dinas Perikanan Dan Kelautan Kabupaten Rokan Hilir sedangkan penelitian ini membahas tentang Implementasi Perda Provinsi Lampung Nomor 12 Tahun 2014 Tentang Optimalisasi Pemanfaatan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Menurut Perspektif *Fiqh Siyasah*.

H. Metode Penelitian

Dalam penelitian ini digunakan beberapa metode agar memperoleh hasil penelitian yang lengkap dan dapat dipertanggungjawabkan. Dan untuk mengumpulkan data tersebut penulis menggunakan metode sebagai berikut :

1. Jenis dan sifat Penelitian.

a. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan oleh penulis dalam penelitian ini adalah termasuk *field research* atau penelitian lapangan yaitu penelitian yang dilakukan dengan mencari data melalui survei langsung ke lapangan sehingga penulis bisa secara langsung melakukan observasi atau pengamatan di lokasi tersebut.¹⁶

Penelitian kualitatif ini sifatnya hanya menggambarkan serta menjabarkan temuan di lapangan tanpa memerlukan hipotesis, Metode ini juga mengangkat fakta, keadaan,

¹⁵Yasrizal Yasrizal, «Analisis Pendapatan Nelayan Tradisional Dan Modern Di Kabupaten Aceh Selatan», *Jurnal Perikanan Tropis* 4, núm. 1 (2017): 23, <https://doi.org/10.35308/jpt.v4i1.53>.

¹⁶Maros; Fadlun; Dkk, “*Penelitian Lapangan (Field Research) Pada Metode Kualitatif*,” *Penelitian Lapangan*, (2016), 7.

variabel, dan fenomena-fenomena yang terjadi Ketika penelitian berlangsung dan menyajikan dengan apa adanya.¹⁷

b. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analisis, yaitu suatu metode penelitian yang menggambarkan karakteristik populasi atau fenomena yang sedang diteliti. Penelitian ini bersifat deskriptif karena dianggap sesuai untuk pencarian suatu pemecahan masalah.

2. Sumber Data

Sumber data dalam skripsi ini terbagi menjadi dua sumber yaitu data primer dan data sekunder. Untuk lebih jelasnya akan diuraikan tentang sumber data tersebut :

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung oleh peneliti di lapangan melalui responden.¹⁸ Data primer diperoleh melalui wawancara dan observasi yang langsung dikumpulkan oleh peneliti yang bersumber pada pertanyaan (*interview*) terhadap informan yang memahami terkait persoalan penelitian ini.

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan berbagai informasi yang telah ada sebelumnya dan dengan sengaja dikumpulkan untuk digunakan melengkapi kebutuhan data penelitian, data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, peraturan daerah, undang-undang, jurnal ilmiah, dan buku-buku yang membahas tentang penelitian ini.¹⁹

3. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi adalah suatu kesatuan individu atau subyek pada wilayah dan waktu dengan kualitas tertentu yang

¹⁷Ali Zainudin, "*Metodologi Penelitian Zai*", (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), 107.

¹⁸Syafnidawaty, «Perbedaan Data Primer dan Data Sekunder», *Universitas Raharja*, 2020, 1-2.

¹⁹Ibid.

akan diamati/diteliti.²⁰ Populasi dalam penelitian ini adalah sebanyak 111 orang Pimpinan maupun staf yang Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung serta masyarakat Pulau Pasaran yang berjumlah 1.123 jiwa.

b. Sampel

Sampel penelitian adalah bagian dari populasi yang dijadikan subyek penelitian sebagai "wakil" dari para anggota populasi²¹. Untuk lebih jelasnya non random sampling yang penulis gunakan adalah *purposive sampling* yaitu memilih sekelompok objek yang didasari ciri-ciri atau sifat populasi yang diketahui sebelumnya. Berdasarkan pengertian di atas, sehingga populasi yang dijadikan sampel dalam penelitian ini terdapat 8 narasumber yang terdiri dari: 1 Pengelola Produksi Perikanan Tangkap Ahli Muda Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung, dan 7 masyarakat Pulau Pasaran yang terdiri dari 2 Ketua RT, 2 Pengolah Ikan Teri sekaligus Ketua Kelompok Nelayan, 1 Pengolah Kerang Hijau dan 2 Buruh Penyortir Ikan Teri.

4. Pengumpulan Data

Dalam melakukan pengumpulan data untuk dapat menghasilkan data penelitian yang diperlukan, peneliti menggunakan beberapa Teknik pengumpulan data yaitu:

a. Wawancara

Wawancara merupakan salah satu teknik yang dapat digunakan untuk mengumpulkan data penelitian. Secara sederhana dapat dikatakan bahwa wawancara (*interview*) adalah suatu proses interaksi antara pewawancara dan sumber informasi atau orang yang diwawancarai melalui komunikasi secara langsung. Dapat pula dikatakan bahwa wawancara merupakan percakapan tatap muka antara pewawancara dengan sumber informasi dimana

²⁰Tjutju Soendari, «Metode Penelitian pendidikan Deskriptif», *Metode Penelitian Deskriptif*, 2012, hal 1-26.

²¹Ibid.

pewawancara bertanya langsung tentang suatu objek yang diteliti dan telah dirancang sebelumnya.²² Dalam hal ini peneliti akan menghubungi dan mendatangi secara langsung dengan responden atau informan sebanyak mungkin dari berbagai sumber yang akan memberikan informasi yang betul-betul dapat dipercaya.

b. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan pencarian, penyelidikan, pengumpulan, pengawetan, penguasaan, pemakaian, dan penyediaan dokumen terkait dengan suatu hal. Artinya, dokumentasi adalah sebuah cara yang dilakukan untuk menyediakan dokumen-dokumen dengan menggunakan bukti yang akurat dari pengumpulan dan pencatatan sumber-sumber informasi khusus dari karangan, tulisan, wasiat, buku, undang-undang dan sebagainya. Dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan data kemudian di telaah dalam sebuah penelitian.

5. Metode Pengolahan Data

Pada jenis penelitian kualitatif ini, data harus sesuai dengan keabsahan data. Pengolahan data dalam penelitian kualitatif juga dilakukan dengan cara mengklasifikasikan dan menguraikan data dalam bentuk deskripsi atau kalimat yang benar, teratur, cermat, beruntun, logis, dan efektif. Pengolahan data pada penelitian ini terdiri dari:

- a. Editing dilakukan setelah menghimpun data di lapangan karena terkadang masih adanya data yang terlewatkan dan belum terpenuhi harapan peneliti.
- b. Classifying agar penelitian lebih sistematis maka peneliti melakukan klasifikasi dari hasil wawancara berdasarkan kategori tertentu, yaitu berdasarkan pertanyaan dan rumusan masalah, sehingga data yang diperoleh benar-benar memuat informasi yang dibutuhkan.
- c. Verifikasi tahap ini merupakan tahap penarikan kesimpulan dari semua data yang telah diperoleh sebagai hasil dari

²²Muri Yusuf, "*Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif & Penelitian Gabungan*", (Jakarta: Prenada Media Grub, 2014), 372.

penelitian. Verifikasi dilakukan dengan cara mencocokkan dan mendengarkan hasil wawancara yang dilakukan sebelumnya dalam bentuk tulisan hasil dari wawancara.

6. Analisis Data

Dalam menganalisa data penelitian ini digunakan metode analisis kualitatif, yaitu tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif analisis yaitu apa yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan. Dari hasil analisa tersebut dapat diketahui serta diperoleh kesimpulandenganteknikinduktif, yaitu cara berfikir dalam mengambil kesimpulan secara umum yang didasarkan atas fakta-fakta yang bersifat khususdalam memberikan penjelasan mengenai Implementasi Pasal 25 Peraturan daerah Provinsi Lampung Nomor 12 Tahun 2014 Tentang Optimalisasi Pemanfaatan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Menurut Perspektif *Fiqh Siyasah*.

I. Sistematika Pembahasan

Penulisan skripsi ini dibagi dalam lima bab, secara sistematika pembahasan tersebut adalah sebagai berikut :

Bab satu berisi pendahuluan tentang penegasan judul, latar belakang masalah, fokus dan sub fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian terdahulu yang relevan, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab dua merupakan landasan teori yang berisi pembahasan teoritis mengenai fiqh siyasah dan ruanglingkupnya, peraturandaerah, dan sumberdayakelautan dan perikanan.

Bab tiga berisi tentang laporan hasil penelitian yang membahas tentang gambaran umum objek serta penyajian fakta dan data berdasarkan kenyataan yang ada di lapangan, visimisi, dan struktur organisasi Lembaga.

Bab empat membahas tentang analisis data berupa temuan penelitian mengenai “Implementasi Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 12 Tahun 2014 Tentang Optimalisasi Pemanfaatan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Menurut

Perspektif *Fiqh Siyasah* (Studi di Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung)”.

Bab lima sebagai penutup yang membahas kesimpulan yang berisi inti dari keseluruhan pembahasan dan rekomendasi sebagai saran yang diperlukan untuk kedepannya.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Implementasi Pasal 25 Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 12 Tahun 2014 Tentang Optimalisasi Pemanfaatan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan di Pulau Pasaran oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung sudah terlaksana dengan baik dengan adanya kegiatan pembinaan, penyuluhan maupun sosialisasi yang dilakukan pada masyarakat yang tergabung dalam sektor perikanan di Pulau Pasaran.
2. Perspektif *Fiqh Siyasa* Terhadap Implementasi Pasal 25 Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 12 Tahun 2014 Tentang Optimalisasi Pemanfaatan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan di Pulau Pasaran sudah sejalan dengan kaidah *Fiqh Siyasa* dimana kebijakan yang dilaksanakan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung dapat mendatangkan kemaslahatan bagi banyak orang, sehingga konsep dan aturan yang berlaku sesuai dengan *Fiqh Siyasa Tanfidziyah* dan norma-norma hukum Islam.

B. Rekomendasi

Berdasarkan pemaparan kesimpulan diatas, maka peneliti akan memberikan rekomendasi sebagai berikut:

1. Bagi Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung untuk lebih meningkatkan kinerja dan program kerja serta koordinasi terhadap masyarakat Pulau Pasaran guna mendukung optimalisasi pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan agar berkelanjutan.
2. Bagi masyarakat Pulau Pasaran untuk turut aktif berpartisipasi dalam segala kegiatan yang berkaitan dengan pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan yang tersedia guna meningkatkan kesejahteraan bersama.

DAFTAR RUJUKAN

- Abdul Wahhab Khallaf, Zainudin Adnan. *al-siyasah al-syariyyah*. Jakarta: Tria Wacana, 2019.
- Ali, Mahrus. «Potensi Wisata Bahari Pulau Pasaran Bandar Lampung». *Prosiding Seminar Nasional Swasembada Pangan*, núm. April (2015): 568-75.
- Andi Agus. «Pengelolaan dan Penggunaan Sumberdaya Kelautan/Perikanan» Volume 1 ((2018): 94.
- ash shiddieqy, teungku muhammad hasbi. *pengantar ilmu fiqh*. pustaka rizki putra, 2020.
- Bagus, Ida, Gede Pujaastawa, Pogram Studi Antropologi, Fakultas Sastra, dan Budaya, Universitas Udayana. «Teknik wawancara dan observasi untuk pengumpulan bahan informasi», 2016, 1-11.
- Bambang Iriana Djajaatmadja, SH, LL.M. «Harmonisasi Hukum Pengelolaan Sumber Daya Kelautan Dalam Kerangka Desentralisasi». Jakarta, 2005.
- Dkk, Maros; Fadlun; «Penelitian lapangan (field research) pada metode kualitatif». *Penelitian Lapangan*, 2016, 1-26.
- dr.faisal akbar nasution, S.H., M.HUM. «dasar-dasar konstitusional pembentukan peraturan daerah» volume no, núm. ISSN 1411-0717 (s.d.).
- Efendi. «Upaya Kelompok Nelayan Welas Asih Dalam Pemberdayaan Ekonomi Anggota di Pulau Pasaran Kelurahan Kota Karang, Kecamatan Teluk Betung Timur Kota Bandar Lampung». *Skripsi*, 2019, 1-9. <https://doi.org/10.37708/0033-2909.I26.1.78>.
- Eka N.A.M. Sihombing. «Penyusunan Program Pembentukan Peraturan Daerah (Urgensi dan Problematikanya)», 2015. <https://sumut.kemenkumham.go.id/berita-kanwil/berita-utama/penyusunan-program-pembentukan-peraturan-daerah-urgensi-dan-problematikanya>.
- Eliawati, Siti Nurjamilah. «buruh penyortir ikan teri», 2023.
- Gusmansyah, Wery. «Trias Politika Dalam Perspektif Fiqh Siyasah», 2019, 128. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.29300/imr.v212.1448>.
- Gusyani Enggla Novia. «Implementasi Peraturan Daerah Provinsi

- Sumatera Barat Nomor 4 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Dan Perlindungan Sumberdaya Ikan». *Diploma Tesis, Universitas Andalas*, 2019, 2-4.
- Hardian, Debi, Indra Gumay Febryano, Supono Supono, Abdullah Aman Damai, i Gunardi Djoko Winarno. «Pelarangan Cantrang: Strategi Pengembangan Keberlanjutan Sumberdaya Ikan Di Teluk Lampung». *Journal of Tropical Marine Science* 3, núm. 1 (2020): 21-27.
<https://doi.org/10.33019/jour.trop.mar.sci.v3i1.1734>.
- hendrik. «ketua kelompok nelayan waluya», 2023.
- Imam Subekti. «implikasi pengelolaan sumberdaya perikanan laut di indonesia berlandaskan code of responsible fisheries (CCRF)». *Jurnal Ilmiah Hukum QISTI* vol 4. No. (2010): 42.
<https://doi.org/http://dx.doi.org/10.31942/jqi.v4i1.595>.
- indah apriliani. «analisis penentuan harga pokok produksi dalam menetapkan harga jual ditinjau dari perspektif ekonomi islam». uin raden intan lampung, 2018.
- khamami zada, MUjar ibnu syarif. *fiqh siyasah : doktrin dan pemikiran politik islam*. Erlangga, 2008.
- Larnpung, Cabang, Pemantauan Lingkungan, Industri Makanan, i Ringan Kemasan. «· Gubernur Lampung» 2 (2014): 1-10.
- Lubis, Nur Ahmad Fadhil. «Islamic Encyclopedia», 1993.
- M-30. «Kenali UNCLOS, Dasar Hukum Internasional untuk Kedaulatan Indonesia di Natuna». Publik, 2020.
- M Edward Rinaldo, Hervin Yoki Pradikta. (Analisis Fiqh Siyasah Dusturiyah Dalam Pembentukan Peraturan Tentang Trading In Influence Dalam Hukum Positif Di Indonesia). *Constitutional Law Vol 1*.
- Monografi pulau pasaran, 2019.
- Muhammad Iqbal. *fiqh siyasah : kontekstualisasi dokrin politik islam* /. jakarta: Prenada Media Group, 2014.
- Nur, Ardian. «Analisis Fiqih Siyasah Terhadap Peran Dinas Klautan dan Perikanan Kabupaten Pesisir Barat Dalam Meningkatkan Penghasilan Nelayan Tradisional di Kecamatan Pesisir Tengah», 2020.
- Panji, Georgius, Indarja, i Amiek Soemarmi. (Tugas Dan Wewenang

- Dinas Kelautan Perikanan Dalam Pengelolaan Usaha Perikanan Di Provinsi Lampung». *Diponegoro Law Journal* 5, núm. 3 (2016).
- Patel. «Studi Keberadaan Ikan Asin», 2017.
- «peraturan gubernur nomor 80 tahun 2016 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja dinas kelautan dan perikanan.
- «Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 57/PERMEN-KP/2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 17/PERMEN-KP/2020 Tentang Rencana Strategis Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2020-2024.
- Rencana Kerja Dinas Kelautan Dan Perikanan Tahun 2023.
- RI, Kementerian Agama. «Q.S An-Nahl (16) ayat 14.
- Rindy Mustika, Hervin Yoki Pradikta. (pelaksanaan pelayanan kesehatan penyandang disabilitas: perspektif fiqih siyasah) *constitutional law* vol 1, no (2022).
- rosidin. «ketua kelompok nelayan welas asih», 2023.
- Sa'adah, Muhimmatus. «Strategi Optimalisasi Pengelolaan Sumber Daya Perikanan dan Kelautan Daerah». *Jurnal Administrasi Publik* 1, núm. 8 (octubre 2013).
- Samsu, La. «Al-Sultah Al-Tasyri'iyah, Al-Sultah Al-Tanfidziyah, Al-Sultah Al-Qada'iyah» Vol. XIII, (s.d.).
- Sendari, Anugerah Ayu. «Implementasi adalah Pelaksanaan Tujuan, Pahami Pengertian dan Contohnya». Publik, 2021.
- silmi nurul utami. «apa yang dimaksud dengan letak geografis». 2022. <https://www.google.com/amp/s/amp.kompas.com/skola/read/2022/07/140000269>.
- Soemarmi, Amiek, Erlyn Indarti, Amalia Diamantina, Jl Soedarto, i Tembalang Semarang. «Pengertian “negara kepulauan” dalamkonsepsi negara kepulauan Indonesia berasaldari pengertian Nusantara.» *Jilid* 48, núm. 3 (2019): 2527-4716.
- Soendari, Tjutju. «Metode Penelitian pendidikan Deskriptif». *Metode Penelitian Deskriptif*, 2012.
- Syafnidawaty. «Perbedaan Data Primer dan Data Sekunder». *Universitas Raharja*, 2020, 1-2.

- Titin H. (Aspek Sosial Ekonomi untuk Tata Kelola Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Berkelanjutan), 2021. <https://kkp.go.id/brsdm/sosek/artikel/33688-aspek-sosial-ekonomi-untuk-tata-kelola-sumber-daya-kelautan-dan-perikanan-berkelanjutan>.
- Tomi Romadona, T. Kusumastanto, dan A.Fahrudin. «Kebijakan Pengembangan Sumberdaya Perikanan Berkelanjutan dan Berperspektif Mitigasi Bencana di Padang Sumatera Barat». *Jurnal Kebijakan Sosial Ekonomi*, 2012, 145.
- «Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2014 Tentang Kelautan», 2014.
- Universitas Bung Hatta. «Otonomi Daerah dan Pemberdayaan Nelayan», 2005. <https://bunghatta.ac.id/artikel-73-otonomi-daerah-dan-pemberdayaan-nelayan.html>.
- Yasrizal, Yasrizal. «Analisis Pendapatan Nelayan Tradisional Dan Modern Di Kabupaten Aceh Selatan». *Jurnal Perikanan Tropis* 4, núm. 1 (2017): 23. <https://doi.org/10.35308/jpt.v4i1.53>.
- Yuliandri. *Asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik: Gagasan pembentukan undang-undang berkelanjutan*. jakarta: rajawali pers, 2011. <http://opac.lib.ulm.ac.id/id/opac/detail.php?q1=340&q2=Yul&q3=a&q4=978-979-769-259-9>.
- Yusuf, Muri. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif & Penelitian Gabungan*, 2014.
- Zaunidin, Ali. «metodologi penelitian zai.pdf», 2010.